

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
BONTANG
NOMOR 01 TAHUN 2017**

KOTA

TENTANG

**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA 2017 - 2021
DI LINGKUNGAN DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KOTA BONTANG**

KEPALA DINAS,

Menimbang : bahwa dalam melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Utama Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Bontang.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839) Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
5. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
6. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;

8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Bontang Tahun 2005-2025;
10. Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU** : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Bontang untuk menetapkan Rencana Kinerja Tahunan, menyampaikan rencana kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Bontang Tahun 2016 – 2021.
- KEDUA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Bontang
Pada tanggal : 10 Januari 2017

KEPALA DINAS,

Drs.Dobi Rizami, M, Si
Pembina Utama Muda
NIP. 196108281987011002

FORMAT LAMPIRAN INDIKATOR KINERJA UTAMA 2017

1. Unit Organisasi : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2. Tugas : Melaksanakan penyusunan dan kebijakan daerah bidang perpustakaan dan kearsipan.
3. Fungsi : a. Perumusan, Perencanaan, Pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis dibidang perpustakaan
b. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian teknis dibidang Kearsipan.
c. Penyelenggaraan urusan kesekretariatan;
d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
4. Indikator Kinerja Utama :

NO	Sasaran Renstra	Indikator Kinerja Utama	Cara Penghitungan	Sumber Data
1	Berkembangnya pelayanan dan aksesibilitas perpustakaan dan optimalisasi minat baca masyarakat	Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun (persentase jumlah pengunjung perpustakaan terhadap jumlah populasi yang dilayani)	Jumlah pengunjung perpustakaan dibagi jumlah populasi yang dilayani dikali 100%	Bidang Perpustakaan
2	Meningkatnya kecukupan koleksi buku (bahan pustaka)	Jumlah buku yang tersedia di perpustakaan daerah	Jumlah judul buku yang tersedia	Bidang Perpustakaan
3	Meningkatnya kualitas perpustakaan daerah, perpustakaan sekolah dan perpustakaan swasta	Jumlah perpustakaan (daerah,sekolah,swasta)	Jumlah perpustakaan yang ada (daerah, sekolah, dan swasta)	Bidang Perpustakaan
4	Pemenuhan informasi bahan pustaka pada sarana layanan	Jumlah perpustakaan taman baca dan pojok baca	Jumlah sarana taman baca/pojok baca yang tersedia di Kota Bontang	Bidang Perpustakaan
5	Meningkatnya SDM pengelola kearsipan dan system administrasi kearsipan yang berkualitas	Persentase jumlah SKPD yang menerapkan arsip secara baku terhadap jumlah SKPD	Jumlah SKPD yang menerapkan arsip secara baku, dibagi dengan jumlah SKPD yang ada, dikali 100%	Bidang Kearsipan
6	Meningkatnya pengelolaan arsip di lingkungan pemerintah daerah	Jumlah peningkatan SDM pengelola kearsipan	Jumlah kegiatan pembinaan kearsipan	Bidang Kearsipan

